

UTANG PEMERINTAH DAN DEFISIT ANGGARAN: ANALISIS KRITIS TEORI MANKIOW DALAM KONTEKS INDONESIA DAN SECARA UMUM

Sanusi Ghazali Pane¹, Zuhrah Faisa Arsyil Siregar², Puji Afriani³, T.Arya Zikri Pratama⁴

sanusi.gazali.pane@gmail.com¹

Universitas Pembangunan Panca Budi

ABSTRAK

Artikel ini membahas utang pemerintah dan defisit anggaran berdasarkan teori makroekonomi yang dikemukakan oleh N. Gregory Mankiw. Melalui pendekatan resensi dan ulasan kritis terhadap buku *Macroeconomics*, artikel ini mengeksplorasi pandangan tradisional dan Ricardian tentang dampak fiskal, serta bagaimana penerapannya dalam konteks ekonomi Amerika dan relevansinya terhadap negara berkembang seperti Indonesia. Penulis menemukan bahwa teori Mankiw menyediakan kerangka analisis penting, namun memerlukan penyesuaian konteks agar selaras dengan kondisi sosial dan ekonomi Indonesia. Artikel ini menekankan perlunya pengelolaan utang negara yang bijak, transparan, dan mempertimbangkan keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Kata Kunci: Utang Pemerintah, Defisit Anggaran, Teori Mankiw, Kebijakan Fiskal, Indonesia.

ABSTRACT

*This article discusses government debt and budget deficits based on the macroeconomic theory proposed by N. Gregory Mankiw. Through a review and critical analysis of the book *Macroeconomics*, this article explores traditional and Ricardian views on fiscal impact, as well as their application in the context of the American economy and their relevance to developing countries such as Indonesia. The author finds that Mankiw's theory provides an important analytical framework, but requires contextual adjustments to align with Indonesia's social and economic conditions. This article emphasizes the need for prudent, transparent, and sustainable long-term fiscal management of government debt.*

Keywords: Government Debt, Budget Deficit, Mankiw's Theory, Fiscal Policy, Indonesia.

PENDAHULUAN

Utang pemerintah dan defisit anggaran merupakan dua komponen utama dalam kebijakan fiskal yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Keduanya kerap menjadi topik perdebatan antara ekonom, politisi, dan publik karena menyangkut kredibilitas fiskal, keberlanjutan pembangunan, serta kesejahteraan generasi mendatang. Dalam teori makroekonomi modern, peran pemerintah dalam mengatur perekonomian melalui instrumen fiskal semakin ditekankan, khususnya dalam mengatasi krisis, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Namun demikian, muncul pula kekhawatiran terhadap akumulasi utang negara yang tak terkendali dan pelebaran defisit yang dapat membahayakan stabilitas ekonomi dalam jangka panjang.

Gregory Mankiw, dalam bukunya *Macroeconomics*, secara mendalam menjelaskan dinamika utang publik dan defisit fiskal, baik dari perspektif tradisional yang menekankan dampak negatifnya terhadap tabungan nasional dan investasi, maupun dari pendekatan Ricardian yang lebih optimis terhadap rasionalitas masyarakat dalam menyikapi kebijakan fiskal. Mankiw juga menyoroti bagaimana pengeluaran defisit dapat digunakan sebagai alat kebijakan dalam kondisi tertentu seperti perang atau krisis ekonomi, namun tetap harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan efek jangka panjang yang merugikan.

Di negara berkembang seperti Indonesia, isu utang dan defisit menjadi semakin kompleks. Di satu sisi, pemerintah memerlukan sumber pembiayaan besar untuk membangun

infrastruktur, meningkatkan layanan publik, dan mengentaskan kemiskinan. Di sisi lain, ketergantungan pada utang, terutama yang bersumber dari luar negeri atau instrumen pasar keuangan yang sensitif terhadap gejolak global, dapat memperbesar risiko fiskal dan tekanan terhadap nilai tukar. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah menjalankan berbagai reformasi fiskal, termasuk pembatasan defisit anggaran maksimal 3% terhadap PDB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Namun relaksasi aturan tersebut selama masa pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa kebijakan fiskal bersifat fleksibel dan adaptif terhadap situasi krisis, meskipun dengan konsekuensi peningkatan utang yang signifikan.

Penting untuk dicermati bahwa struktur anggaran negara Indonesia menunjukkan tren belanja yang masih didominasi oleh kebutuhan rutin, sementara alokasi untuk belanja modal atau produktif cenderung terbatas. Hal ini mengimplikasikan bahwa utang yang ditarik pemerintah belum sepenuhnya diarahkan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi jangka panjang. Dalam konteks inilah, teori Mankiw dapat menjadi rujukan untuk mengkaji secara kritis bagaimana seharusnya kebijakan fiskal dirancang: apakah untuk merespons kebutuhan jangka pendek atau menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang.

Selain itu, terdapat aspek penting lain seperti kondisi demografi, tingkat literasi keuangan, stabilitas politik, dan efektivitas birokrasi yang turut menentukan apakah kebijakan berbasis defisit dan utang akan berhasil atau justru menimbulkan dampak negatif. Konsep intergenerational equity atau keadilan antargenerasi menjadi isu penting karena utang yang digunakan hari ini, jika tidak memberikan manfaat yang memadai, akan menjadi beban bagi generasi berikutnya.

Dengan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis kritis terhadap teori utang dan defisit anggaran yang dikemukakan oleh Mankiw dan menilai relevansinya dalam konteks Indonesia. Dengan menggabungkan pendekatan teoritis dan analisis situasi faktual di lapangan, diharapkan kajian ini dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang pentingnya tata kelola fiskal yang sehat, transparan, dan berorientasi jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis secara kritis teori ekonomi mengenai utang dan defisit anggaran yang dikemukakan oleh Gregory Mankiw, serta mengevaluasi penerapannya dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Utang dan Defisit dalam Perspektif Mankiw

Mankiw menjelaskan bahwa dalam situasi ekonomi tertentu, defisit anggaran bisa menjadi kebijakan yang tepat. Sebagai contoh, saat ekonomi mengalami resesi, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran atau menurunkan pajak (kebijakan fiskal ekspansif) untuk mendorong permintaan agregat. Namun, jika dilakukan secara terus-menerus tanpa disertai reformasi struktural dan perbaikan pendapatan, maka defisit ini bisa menyebabkan akumulasi utang yang berlebihan dan menurunkan kepercayaan pasar.

Pandangan tradisional menyoroti efek *crowding-out*, yaitu ketika utang pemerintah yang tinggi menyebabkan kenaikan suku bunga, yang pada akhirnya mengurangi investasi sektor swasta. Dalam jangka panjang, hal ini menekan pertumbuhan ekonomi dan memperburuk kesenjangan. Di sisi lain, pendekatan Ricardian lebih menekankan pada ekspektasi masyarakat. Jika masyarakat percaya bahwa utang saat ini berarti pajak lebih tinggi di masa depan, mereka akan menyesuaikan perilaku konsumsi dengan menabung lebih banyak,

sehingga dampak defisit menjadi netral.

Analisis dalam Konteks Indonesia

Dalam praktiknya, Indonesia menghadapi tantangan unik yang membuat penerapan teori Mankiw tidak selalu sejalan sepenuhnya. Beberapa faktor yang membedakan Indonesia dari negara-negara maju dalam konteks ini antara lain:

- Kapasitas fiskal terbatas: Rasio penerimaan pajak terhadap PDB di Indonesia masih di bawah 12%, jauh di bawah standar negara OECD. Hal ini menyebabkan ruang fiskal untuk menambah utang sangat terbatas jika tidak disertai reformasi perpajakan.
- Struktur utang: Sebagian besar utang Indonesia berbentuk surat berharga negara (SBN), dan lebih dari 30% dimiliki oleh investor asing. Ketergantungan ini membuat Indonesia rentan terhadap volatilitas pasar global.
- Kualitas belanja publik: Sebagian besar anggaran masih digunakan untuk belanja pegawai dan subsidi, sedangkan belanja modal yang produktif cenderung terbatas. Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa utang digunakan bukan untuk investasi, melainkan konsumsi.
- Kondisi sosial-ekonomi masyarakat: Rendahnya literasi keuangan, tingginya kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi membuat asumsi rasionalitas penuh sebagaimana digambarkan dalam teori Ricardian sulit untuk diterapkan di Indonesia.

Implikasi Jangka Panjang

Jika utang dikelola dengan tidak hati-hati, maka dalam jangka panjang Indonesia dapat menghadapi jebakan utang (debt trap) atau krisis fiskal, di mana sebagian besar pendapatan negara hanya digunakan untuk membayar bunga utang. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk:

- Melakukan disiplin anggaran dengan meningkatkan efisiensi belanja.
- Mengalihkan utang untuk sektor produktif, seperti infrastruktur, pendidikan, dan teknologi.
- Meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi perpajakan.
- Membangun pasar keuangan domestik yang kuat untuk mengurangi ketergantungan pada investor asing.

KESIMPULAN

Permasalahan utang pemerintah dan defisit anggaran merupakan isu sentral dalam perumusan kebijakan fiskal, baik di negara maju maupun negara berkembang. Melalui analisis kritis terhadap teori Mankiw dalam Macroeconomics, dapat disimpulkan bahwa meskipun utang dan defisit dapat menjadi instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, penggunaannya harus dilandasi dengan pertimbangan rasional, perencanaan jangka panjang, dan manajemen fiskal yang bertanggung jawab.

Dalam pandangan tradisional, defisit dianggap berisiko menurunkan tabungan nasional, menaikkan suku bunga, serta menekan investasi sektor swasta. Sementara itu, pandangan Ricardian menyatakan bahwa dampak defisit dapat dinetralisir oleh perilaku rasional masyarakat. Namun dalam praktiknya, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, kedua pandangan tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan secara mutlak. Rendahnya literasi keuangan, keterbatasan fiskal, serta ketidakpastian politik membuat pengelolaan utang memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan adaptif.

Dalam konteks Indonesia, peningkatan utang pascapandemi menjadi tantangan serius bagi kesinambungan fiskal. Oleh karena itu, kebijakan fiskal perlu diarahkan untuk meningkatkan efisiensi belanja, memperkuat basis pajak, dan mengalihkan pembiayaan utang untuk sektor-sektor produktif yang dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang. Selain itu, penting untuk memperhatikan dimensi keadilan antargenerasi agar beban fiskal

tidak diwariskan secara tidak proporsional kepada generasi mendatang.

Melalui studi ini, diharapkan pembaca dan pengambil kebijakan dapat melihat bahwa utang dan defisit bukan hanya soal neraca dan angka, melainkan tentang pilihan kebijakan yang mencerminkan arah pembangunan, stabilitas ekonomi, dan tanggung jawab sosial. Kajian ini juga membuka ruang bagi penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif atau studi kasus empiris di negara berkembang lain untuk memperkaya pemahaman terhadap dinamika fiskal secara global.

DAFTAR PUSTAKA

- Alesina, A., & Perotti, R. (1996). Fiscal adjustments in OECD countries: Composition and macroeconomic effects. *IMF Staff Papers*, 44(2), 210–248.
- Baldacci, E., & Kumar, M. S. (2010). Fiscal deficits, public debt, and sovereign bond yields. *IMF Working Paper No. 10/184*. <https://doi.org/10.5089/9781455202187.001>
- Barro, R. J. (1974). Are government bonds net wealth? *Journal of Political Economy*, 82(6), 1095–1117. <https://doi.org/10.1086/260266>
- Blanchard, O. (2019). Public debt and low interest rates. *American Economic Review*, 109(4), 1197–1229. <https://doi.org/10.1257/aer.109.4.1197>
- Blanchard, O., & Leigh, D. (2013). Growth forecast errors and fiscal multipliers. *American Economic Review*, 103(3), 117–120. <https://doi.org/10.1257/aer.103.3.117>
- Buiter, W. H. (2004). Fiscal sustainability. *Oxford Review of Economic Policy*, 20(4), 351–371. <https://doi.org/10.1093/oxrep/grh023>
- Cecchetti, S. G., Mohanty, M. S., & Zampolli, F. (2011). The real effects of debt. *BIS Working Paper No. 352*. <https://www.bis.org/publ/work352.htm>
- Corsetti, G., Meier, A., & Müller, G. J. (2012). What determines government spending multipliers? *Economic Policy*, 27(72), 521–565. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0327.2012.00291.x>
- Cottarelli, C., & Schaechter, A. (2010). Long-term trends in public finances in the G-7 economies. *IMF Working Paper No. 10/248*. <https://doi.org/10.5089/9781455209575.001>
- Debrun, X., & Kinda, T. (2017). Strengthening post-crisis fiscal credibility: Fiscal councils on the rise. *Fiscal Studies*, 38(4), 667–700. <https://doi.org/10.1111/1475-5890.12114>
- Elmendorf, D. W., & Mankiw, N. G. (1999). Government debt. In J. B. Taylor & M. Woodford (Eds.), *Handbook of Macroeconomics* (Vol. 1C, pp. 1615–1669). Elsevier.
- Gale, W. G., & Orszag, P. R. (2003). Economic effects of sustained budget deficits. *National Tax Journal*, 56(3), 463–485.
- International Monetary Fund. (2023). *Fiscal Monitor: Public finance for the future*. <https://www.imf.org/en/Publications/FM>
- Krugman, P. (2009). *The return of depression economics and the crisis of 2008*. W.W. Norton & Company.
- Mankiw, N. G. (2021). *Macroeconomics* (10th ed.). Worth Publishers.
- OECD. (2020). *Government at a glance 2019*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/gov_glance-2019-en
- Perotti, R. (1999). Fiscal policy in good times and bad. *Quarterly Journal of Economics*, 114(4), 1399–1436.
- Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2010). *This time is different: Eight centuries of financial folly*. Princeton University Press.
- Tanzi, V., & Schuknecht, L. (2000). *Public spending in the 20th century: A global perspective*. Cambridge University Press.
- World Bank. (2022). *Indonesia Economic Prospects: Managing risks, seizing opportunities*. <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-economic-prospects>